

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR**



**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan rencana kerja ( Renja ) merupakan sebuah kegiatan perencanaan tahunan yang diharapkan mampu memberikan arah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun satu tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD kabupaten LombokTengah 2011-2031 karena perencanaan tahun 2025 tahun taransisi dimana dokumen RPJMD dan Rencana Strategis OPD sudah tersedia , untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih, yang mewarnai Rencana Pembangunan Jangka menengah Derah Kabupaten Lombok Tengah .

Rencana kerja ini disusun sebagai salah satu ikhtiar dalam meningkatkan kinerja SKPD Kantor Camat Praya Timur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Akhirnya terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Rencana kerja ini dapat diselesaikan pada waktunya meskipun tidak sempurna yang diharapkan.

Semoga bermanfaat bagi pelaksanaan tugas pengabdian kita kepada negara dan masyarakat. Amiin.

Mujur ,18 Desember 2023

**CAMAT PRAYA TIMUR,**

**H.LALU FATHURRAHMAN,SH.**

NIP.: 196712311986021020

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4-6
 <b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	
<b>2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian</b>	
<b>Renstra Perangkat Daerah</b>	
Pokok-pokok Materi yang disajikan, antara lain;	
a) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;	
b) Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;	
c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan;	
d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan;	
e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;	
f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.	
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain ;	
a) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;	

- b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
- e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....15-18

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3. Program dan Kegiatan

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain :

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....19-25

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

### BAB V PENUTUP..... 26-23

- a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b) Kaidah - kaidah pelaksanaan
- c) Rencana tidak lanjut

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

**Renja SKPD** adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode 1 (satu) tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Program.

#### **Fungsi Renja**

- a) Memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang.
- b) Dapat mengukur outcome(hasil) yang harus dicapai
- c) Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas
- d) Menjadi alat/ media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.
- e) Mempermudah pencapain target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah melahirkan paradigma baru yaitu sistem pemerintahan yang lebih desentralistik. Hal ini membawa implikasi dalam kegiatan perencanaan, dimana pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab penuh dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pembiayaan pembangunannya. Disamping itu terjadi proses demokratisasi yang lebih nyata, yang ditandai dengan semakin luasnya ruang publik untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan strategi pembangunan daerah.

Sejalan dengan perubahan-perubahan lingkungan strategis dalam tataran normatif dimana peran pemerintah daerah dan masyarakat semakin besar, terdapat tiga isu penting berkaitan dengan kegiatan perencanaan daerah, yaitu peningkatan kualitas proses dan hasil perencanaan, peningkatan kualitas dan hasil monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya daerah yang tersedia dalam rangka meningkatkan kemajuan daerah serta kesejahteraan rakyat.

Oleh karena hasil perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan penganggaran daerah, maka perencanaan mempunyai fungsi yang strategis dalam dinamika pembangunan daerah untuk mendayagunakan potensi dan sumber pembiayaan yang ada dan sangat terbatas.

Kantor Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokoknya membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan umum, pembangunan dan tugas pembantuan serta pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi tersebut, maka Kantor Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah perlu menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan program yang akan ditempuh untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dimaksud.

Strategi tersebut dijabarkan dalam berbagai kebijakan dan program yang mempertimbangkan pengaruh internal dan eksternal, baik yang menyangkut peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan yang ada. Keseluruhan pemikiran mengenai arah serta cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Kantor Camat Praya Timur tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut :
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/2435.SJ tanggal 21 September 2005 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Partisipatif
10. Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara Tanggal 25 Maret 2003 Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031
15. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Penyusunan Renja

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1(satu) tahun dapat tercapai.
  - b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
  - c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
  - d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Camat Praya Timur dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
2. Tujuan Penyusunan Renja
- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Praya Timur sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 1 (satu) tahun.
  - b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan fokus program/kegiatan selama 1 (satu) tahun .
  - c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
  - d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama priode RPJMD berkenaan.
  - e. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan kebijakan.
  - f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah  
Pokok-pokok Materi yang disajikan, antara lain;



- a) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;
- b) Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;
- c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan;
- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan;
- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain ;

- a) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c) Danpaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs(Sustainable Development Goals);
- d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain :

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

#### BAB V PENUTUP

- a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b) Kaidah - kaidah pelaksanaan
- c) Rencana tidak lanjut

## **BAB II**

### **HASILN EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra**

##### **Perangkat Daerah**

Belanja Kecamatan terjabar pada DPA-SKPD Kecamatan Praya Timur Tahun 2023 sebesar Rp. 2.822.804.851,- dengan rincian adalah sebagai berikut :

Hasil capaian dari program dan kegiatan dari Belanja Kecamatan Rp. 2.822.804.851,- terrealisasi sebesar Rp. 2.773.834.423,- atau sebesar 98,27%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp.2.240.805.452,-
  - 1.1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah  
Untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Rp.14.728.881,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :
    - Output : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi kinerja SKPD
    - Outcome : Terbayarnya Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
    - Realisasi : Keuangan sebesar Rp.14.830.500,- ( 99,33 % ) ,
  - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah  
Untuk melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah Rp.1.602.441.436,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :
    - Output : Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD,dan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
    - Outcome : Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan Laporan tahunan/ bulanan/triwulan / semesteran SKPD
    - Realisasi : Keuangan sebesar Rp.1.579.504.858,- ( 98,57 % ) ,
  - 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Untuk melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp.87.028.343,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor,penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,perlengkapan kantor,peralatan rumah tangga,bahan logistik kantor, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.86.174.920,- ( 99,02%) ,

#### 1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp.251.433.180,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Pengadaan Mebel

Outcome : Terpeliharanya perlengkapan kantor

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.245.000.000,- ( 97,44 %) ,

#### 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Untuk melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp.29.384.122,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Penyediaan jasa surat menyurat,dan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Outcome : Terbayarnya jasa surat menyurat,dan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.25.717.545,- ( 87,52%) ,

#### 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Untuk melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp.255.819.500 ,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan,dan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Outcome : Terpeliharanya kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, gedung kantor dan bangunan lainnya

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.243.122.500,- ( 95,04%) ,

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp. 93.034.120,-
- 2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
Untuk melaksanakan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp.93.034.120 ,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :
- Output : Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkait
- Outcome : Terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Realisasi : Keuangan sebesar Rp.91.648.000,- ( 98,51%) ,
- 2.2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
Untuk melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Rp. 0 ,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :
- Output : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
- Outcome : Terlaksananya kegiatan pemerintahan yang dilimpahkan di tingkat kecamatan
- Realisasi : Keuangan sebesar Rp. 0,- ( 0 %)
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp. 36.237.582,-
- 3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Untuk melaksanakan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Rp.29.868.639 ,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :
- Output : Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Outcome : Terlaksananya Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan
- Realisasi : Keuangan sebesar Rp.36.054.000,- ( 99,49 %)
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 27.425.000,-
- 4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Untuk melaksanakan Kegiatan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 27.425.000,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :
- Output : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Outcome : Terlaksananya Kegiatan Bersama dengan Kepolisian RI, TNI, instansi vertikal di kecamatan

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.27.404.300,- ( 99,92%)

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 397.302.697,-

5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Rp. 397.302.697,-

dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama,Ras,dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional,dan Nasional

Outcome : Terlaksananya Kegiatan Bersama dengan Toga, Toma, Lembaga adat di Tingkat Kecamatan

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.396.577.800,- ( 99,82%)

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 28.000.000,-

6.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa

Untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Rp. 28.000.000,-

dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Outcome : Terlaksananya evaluasi RAPBDes di Tingkat Kecamatan

Realisasi : Keuangan sebesar Rp. 28.000.000,- ( 100 %)

Pokok-pokok Materi yang disajikan,antara lain;

- a) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;

**a.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**

***Kegiatan Perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah:***

- penyusunan dokumen pencanaan perangkat daerah, realisasi keuangan = Rp. 2.679.500,- (98,30%)

- koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, realisasi keuangan = Rp.2.266.000,- (99,47%)
- koordinasi dan penyusunan dokumenj perubahan RKA-SKPD,realisasi keuangan =Rp. 1.216.000,- (99,02%)
- koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, realisasi keuangan = Rp. 947.000,- (99,91%)
- *koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, realisasi keuangan = Rp.2.822.000,- ( 99,04)*

**Kegiatan Administrasi Keuangn Perangkat Daerah :**

- *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi keuangan Rp,22.906.578,- (98,56 %)*
- Koordinasi dan penyusunan Laopran Keuangan Akhir Tahun SKPD,realisai keuangan = Rp. 2.000.000,- (99,70 %)
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD,realisasi keuangan = Rp. 11.190.000,- (99,22 %)

**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerag :**

- *Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,realisasi keuangan = Rp. 9.233.000,- (99,19 %)*
- *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi keuangan =Rp.63.334.000,- (99,07)*
- *Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, realisai keuangan =Rp.11.777.920,- (98,48 %)*

**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;**

- *Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, realisasi keuangan = Rp. 245.000.000,- (97,44)*

**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;**

- *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi keuangan = Rp. 24.637.545,- ( 87,05 %)*

**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;**

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan , ralisasi keuangan = Rp. 43.567.500,- ( 78,04 %)*
- *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ,realisasi keuangan = Rp. 199.555.000,- (99,78 %)-*

**a.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertikal Terkait, realisasi keuangan = Rp. 91.648.000,- (98,51)-

**a.3. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan**

**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Realisasi keuangan = Rp. 36.054.000,-(99,49 %)

**a.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;**

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan, realisasi keuangan = Rp. 27.404.300,- (99,92 %)

**a.5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;**

- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional, realisasi keuangan = Rp.396.577.800,-(99,82%)

b) Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;

**b.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**

**b.1.1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , realiasai keuangan = Rp. 4.200.000,-(100 % )

**b.1.2.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, realisasi keuangan = Rp. 1.830.000- (100 %)

**b.1.3.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan Jasa surat Menyurat, realisasi keuangan = Rp.1.080.000,- (100 %)

**b.2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**



***b.2.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, realisasi keuangan = Rp. 28.000.000,- (100 %)

- c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan;

***Tidak Ada***

- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan; ***Karena di belanja operasi, belanja bahan bakar dan pelumas terjadi turun naiknya harga.***

- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Praya Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan berkualitas yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan;
2. Membangun komitmen aparatur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparatur yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

- f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

- **Sebelum melakukan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya harus melihat perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan anggaran supaya tidak terjadi hambatan/penyebab tidak optimalnya capaian program..**

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Lombok Tengah**

**Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Praya Timur**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome )/Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun (n-3) 2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Unsur Kewilayahan</b>									
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>B Predikat</b>	<b>B Predikat</b>	<b>CC Predikat</b>	<b>CC Predikat</b>		B Predikat	B Predikat	
	<b>Kegiatan</b> Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	300 %	
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan SKPD (RKT, RKT Perubahan,renja, renja perubahan )	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	6 dokumen	

	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	36 Laporan	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>		<b>3 dokumen</b>	<b>9 dokumen</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan		12 laporan	36 laporan	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	3 laporan	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan /Triwulan/Semesteran	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan		12 laporan	36 laporan	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian pekerja sesuai SOP</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>300 %</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis		5 jenis	15 jenis	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Komputer dan perlengkapannya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	3 unit	
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	peralatan rumah tangga	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis		5 jenis	15 jenis	

	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Barang cetakan	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis		7 jenis	7 jenis	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 lap.	4 lap.	4 lap.	4 lap.		4 lap.	4 lap.	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase validasi data aset OPD</b>	<b>4 jenis / 73 jenis</b>	<b>4 jenis / 73 jenis</b>	<b>4 jenis / 73 jenis</b>	<b>4 jenis / 73 jenis</b>		<b>4 jenis / 73 jenis</b>	<b>4 jenis / 73 jenis</b>	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Mebel	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis		3 jenis	3 jenis	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lap.Internet	120 mbps	120 mbps	120 mbps	120 mbps		120 mbps	120 mbps	
		Lap. air	6000 m3	6000 m3	6000 m3	6000 m3		6000 m3	6000 m3	
		Lap. Listrik	6.456 kwh	6.456 kwh	6.456 kwh	6.456 kwh		6.456 kwh	6.456 kwh	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD kondisi baik</b>	<b>59 jenis / 398 buah</b>	<b>59 jenis / 398 buah</b>	<b>59 jenis / 398 buah</b>	<b>59 jenis / 398 buah</b>		<b>59 jenis / 398 buah</b>	<b>59 jenis / 398 buah</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kendaraan dinas terpelihara	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit		14 unit	14 unit	

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang terpelihara/direhab	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit		
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<i>Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan</i>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		
	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		
	Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Profil kecamatan	1 lap.	1 lap.	1 lap.	1 lap.		1 lap.		
		Laporan hasil koordinasi pemerintahan umum	1 lap.	1 lap.	1 lap.	1 lap.		1 lap.		
		Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	1 lap.	1 lap.	1 lap.	1 lap.		1 lap.		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 lap.	1 lap.	1 lap.	1 lap.		1 lap.		
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan</b>	<b>Porsentase usulan masyarakat yang disetujui</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>		<b>15%</b>		

	<b>Kelurahan</b>									
	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Porsentase usulan sesuai prioritas daerah</b>	<b>35 %</b>	<b>35 %</b>	<b>35 %</b>	<b>35 %</b>		<b>35 %</b>		
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan hasil musrenbang kecamatan	<b>1 lap.</b>	<b>1 lap.</b>	<b>1 lap.</b>	<b>1 lap.</b>		<b>1 lap.</b>		
	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>		<b>93%</b>		
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i><b>Dokumen Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b></i>	<b>120 dok.</b>	<b>120 dok.</b>	<b>120 dok.</b>	<b>120 dok.</b>		<b>120 dok.</b>		
	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang telah di evaluasi R-APBDes	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa		14 desa		
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>persentase urusan pemerintahan umum yang di koordinasikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>Persentase konflik sosial yang diselesaikan</b>	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>		<b>85 %</b>		
	Sub Kegiatan Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Laporan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari besar Nasional	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.		1 keg.		
		Tabliq akbar ramadhan	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.		1 keg.		

		Laporan pelaksanaan MTQ/STQ tingkat kecamatan	1 lap.	1 lap.	1 lap.	1 lap.		1 lap.		
		Perayaan HUT RI	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.		1 keg.		
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa</b>	<b>Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>		<b>93%</b>		
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120 dok.	120 dok.	120 dok.	120 dok.		120 dok.		
	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang telah di evaluasi R-APBDes	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa		14 desa		

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Kantor Camat Praya Timur perlu dibuat Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output), sebagai berikut :

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n +1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase penurunan gangguan trantibum			20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	
2	Prosentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat			75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	
3	Prosentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder			75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	
4	Nilai kinerja camat			190 Poin	190 Poin	190 Poin	190 Poin	190 Poin	190 Poin	190 Poin	190 Poin	
5	IKM			79 Poin	79 Poin	80 Poin	80 Poin	80 Poin	80 Poin	80 Poin	80 Poin	
6	Persentase desa maju di wilayah kecamatan			90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	
7	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang di			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
8	Persentase layanan sesuai SOP			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
9	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu			85 %	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	



10	Persentase usulan masyarakat yang di setujui			15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	
11	Persentase urusan pemerintahan umum yang koordinasikan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan;
3. Perkembangan Iptek yang pesat yang tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Membangun komitmen aparatur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal;

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain ;

- a) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;  
Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah telah menunjukkan tingkat kemajuan yang menggembirakan, hal ini ditunjukkan dengan capaian target kinerja pelayanan publik yang diperjanjikan . Keadaan ini sebagai pengaruh adanya perencanaan yang semakin baik pada sistem perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kantor Camat Praya Timur sebagai berikut;
  1. Kuantitas Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di Kantor Camat Timur masih kurang, yang berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.
  2. Kurangnya pelatihan pegawai yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- c) Danpaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs(Sustainable Development Goals) adalah;  
Ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, adanya manajemen kepegawaian yang baik, ketersediaan data yang valid dan akurat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.
- d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah;

1. Terdapat ketidakseimbangan rasio antara beban kerja SKPD dengan jumlah sarana serta personil yang akan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
  2. Jumlah anggaran Kantor Camat Praya Timur sebagai sebuah SKPD masih kurang.
  3. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu.
  4. Adanya beberapa tugas tambahan yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah sebagai berikut.
1. Perijinan;
  2. Rekomendasi;
  3. Koordinasi;
  4. Pembinaan;
  5. Pengawasan;
  6. Pasilitasi;
  7. Penetapan;
  8. Penyelenggaraan; dan

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4

## Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Lombok Tengah

N	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>4.655.045.720</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>4.655.045.720</b>	
	<b>KECAMATAN</b>				<b>4.655.045.720</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>4.655.045.720</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Ktr.Camat Pratim	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>B Predikat</b>	<b>373.260.058</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Ktr.Camat Pratim	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>B Predikat</b>	<b>373.260.058</b>	
	<i>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase IKU OPD yang disetujui</i>	<b>100 %</b>	<b>373.260.058</b>	<i>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase IKU OPD yang disetujui</i>	<b>100 %</b>	<b>373.260.058</b>	
	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan (Renstra Renja)	2 dok.	3.121.006	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan (Renstra Renja)	2 dok.	3.121.006	
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SK		Dokumen RKA SKPD	1 Dok.	1.757.908	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SK		Dokumen RKA SKPD	1 Dok.	1.757.908	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen RKPA SKPD	1 Dok.	1.081.704	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen RKPA SKPD	1 Dok.	1.081.704	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen DPA SKPD	1 Dok.	1.081.704	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen DPA SKPD	1 Dok.	1.081.704	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan		Dokumen DPPA SKPD	1 Dok.	1.081.704	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan		Dokumen DPPA SKPD	1 Dok.	1.081.704	

	DPA-SKPD					DPA-SKPD				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD		5.491.158		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD		5.491.158	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil evaluasi kinerja kinerja PD ( LKJIP,LPPD,LKPD)	3 Dok.	5.491.158		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil evaluasi kinerja kinerja PD ( LKJIP,LPPD,LKPD)	3 Dok.	5.491.158	
	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD</b>	<b>3 dok.</b>	<b>2.563.590.232</b>		<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD</b>	<b>3 dok.</b>	<b>2.563.590.232</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	20 dok.	2.552.666.162		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	20 dok.	2.552.666.162	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	TPP PNS	20 dok.			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	TPP PNS	20 dok.		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan SKPD	12 Lap.	6.080.189		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan SKPD	12 Lap.	6.080.189	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Tahunan SKPD	1 Lap.	4.843.882		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Tahunan SKPD	1 Lap.	4.843.882	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP</b>	<b>100 %</b>	<b>230.134.512</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP</b>	<b>100 %</b>	<b>230.134.512</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan	5 jenis	12.623.832		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan	5 jenis	12.623.832	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer dan perlengkapannya	1 Unit	146.830.592		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer dan perlengkapannya	1 Unit	146.830.592	

		Printer	6 Unit			Printer	6 Unit		
		Laptop	2 Unit			Laptop	2 Unit		
		alat kebersihan	5 jenis			alat kebersihan	5 jenis		
		peralatan dan perlengkapan lainnya	2 Jenis			peralatan dan perlengkapan lainnya	2 Jenis		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		peralatan rumah tangga	5 jenis	34.386.380	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga	5 jenis	34.386.380	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 lap.	36.293.708	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 lap.	36.293.708	
<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>		<b>Persentase validasi data aset OPD</b>	<b>4 jenis / 73 jenis</b>	<b>23.186.156</b>	<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	<b>Persentase validasi data aset OPD</b>	<b>4 jenis / 73 jenis</b>	<b>23.186.156</b>	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan dinas	1 unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas	1 unit		
Pengadaan Kendaraan Dinas operasional		Kendaraan dinas	1 unit		Pengadaan Kendaraan Dinas operasional	Kendaraan dinas	1 unit		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan mesin lainnya	1 jenis		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan mesin lainnya	1 jenis		
Pengadaan Mebel		Mebel	3 jenis		Pengadaan Mebel	Mebel	3 jenis		
<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>		<b>Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>27.129.773</b>	<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>27.129.773</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12 bulan	1.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12 bulan	1.800.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		Lap.Internet	120 mbps	9.183.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Lap.Internet	120 mbps	9.183.900	

	Daya Air dan Listrik					Daya Air dan Listrik				
		Lap. air	6000 m3	6.587.119			Lap. air	6000 m3	6.587.119	
		Lap. Listrik	6.456 kwh	8.962.954			Lap. Listrik	6.456 kwh	8.962.954	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD kondisi baik</b>	<b>59 jenis / 398 buah</b>	<b>130.327.527</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD kondisi baik</b>	<b>59 jenis / 398 buah</b>	<b>130.327.527</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas terpelihara	13 unit			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas terpelihara	13 unit		
		STNK kendaraan dinas yang di perbaharui	13 unit				STNK kendaraan dinas yang di perbaharui	13 unit		
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12 bulan				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12 bulan		
		Rehabilitasi Kantor Camat	1 paket				Rehabilitasi Kantor Camat	1 paket		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan</b>	<b>100 %</b>	<b>212.039.414</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan</b>	<b>100 %</b>	<b>212.039.414</b>	
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di kecamatan</b>	<b>100 %</b>			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di kecamatan</b>	<b>100 %</b>		
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Profil kecamatan	1 lap.			Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Profil kecamatan	1 lap.		

	perangkat daerah dan instansi vertikal terkait					perangkat daerah dan instansi vertikal terkait					
		Laporan hasil koordinasi pemerintahan umum	1 lap.				Laporan hasil koordinasi pemerintahan umum	1 lap.			
		Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	1 lap.				Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	1 lap.			
	<b>Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	<b>2 Dok.</b>			<b>Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	<b>2 Dok.</b>			
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 lap.			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 lap.			
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Porsentase usulan masyarakat yang disetujui</b>	<b>20%</b>	<b>78.354.079</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Porsentase usulan masyarakat yang disetujui</b>	<b>20%</b>	<b>78.354.079</b>		
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Porsentase usulan sesuai prioritas daerah</b>	<b>45 %</b>			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Porsentase usulan sesuai prioritas daerah</b>	<b>45 %</b>			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan hasil musrenbang kecamatan	1 lap.			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan hasil musrenbang kecamatan	1 lap.			
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu</b>	<b>97 %</b>	<b>99.299..718</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu</b>	<b>97 %</b>	<b>99.299..718</b>		



	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		<i>Dokumen Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	120 dok.		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		<i>Dokumen Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	120 dok.		
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		Jumlah desa yang telah di evaluasi R-APBDes	14 Desa		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		Jumlah desa yang telah di evaluasi R-APBDes	14 desa		
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat</b>	<b>100 %</b>	<b>53.009.853</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat</b>	<b>100 %</b>	<b>53.009.853</b>	
	<b>Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum</b>		<b>Presntase gangguan tratribum yang ditangani</b>	<b>70 %</b>		<b>Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum</b>		<b>Presntase gangguan tratribum yang ditangani</b>	<b>70 %</b>		
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		Laporan hasil patroli terpadu kecamatan	1 lap.		Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		Laporan hasil patroli terpadu kecamatan	1 lap.		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>persentase urusan pemerintahan umum yang di koordinasikan</b>	<b>100 %</b>	<b>373.260.058</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>persentase urusan pemerintahan umum yang di koordinasikan</b>	<b>100 %</b>	<b>373.260.058</b>	
	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>		<b>Persentase konflik sosial yang diselesaikan</b>	<b>90 %</b>		<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>		<b>Persentase konflik sosial yang diselesaikan</b>	<b>90 %</b>		

	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional		Laporan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari besar Nasional	1 keg.		Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional		Laporan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari besar Nasional	1 keg.		
			Tabliq akbar ramadhan					Tabliq akbar ramadhan			
			Laporan pelaksanaan MTQ/STQ tingkat kecamatan					Laporan pelaksanaan MTQ/STQ tingkat kecamatan			
			Perayaan HUT RI					Perayaan HUT RI			

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang telah ditetapkan Kantor Camat Praya Timur adalah :

- ***Koordinasi Kecamatan dengan stakeholder***
- ***Peningkatan layanan administrasi***
- ***Peningkatan kualitas layanan***
- ***Peningkatan Laporan Keuangan dan Kinerja kecamatan***

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan, sasaran ini diarahkan dalam upaya melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, khususnya misi kesatu, “ **Merawat Ahlaqul Karimah dalam kehidupan bermasyarakat** “ dan Misi ketiga “**Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih**”.

##### Tujuan

Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan layanan pemerintah dalam pelayanan publik, Kantor Camat Praya Timur, bertujuan :

- ***Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat.***  
Indikator tujuan adalah : Persentase penurunan gangguan trantibum
- ***Meningkatnya kinerja kecamatan***

Indikator tujuan adalah : Nilai kinerja camat

##### Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Praya Timur dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas adalah :

- **Meningkatnya peranserta masyarakat dan steke holder terkait dalam pengendalian trantibum**

Indikator sasaran adalah :

- Prosentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat
- Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder
- **Meningkatnya kualitas layanan Publik.**  
Indikator sasaran adalah :  
Indeks kepuasan masyarakat (IKM )
- **Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa**  
Indikator sasaran adalah :  
Persentase desa maju di tingkat kecamatan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Camat Praya Timur beserta indikator kerjanya disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025  
Kabupaten Lombok Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATAOR SASARAN	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat.		Persentase penurunan gangguan trantibum	25%	30%
		Meningkatnya peranserta masyarakat dan steke holder terkait dalam pengendalian trantibum	Prosentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat	75%	75%
			Prosentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder	75%	75%
	Meningkatnya kinerja kecamatan		Nilai kinerja camat	200 poin	215 poin
		Meningkatnya kualitas layanan Publik	IKM	81 poin	86 poin
		Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	100%	100%
			Persentase penyelenggaraan pelayanan yang di limpahkan	100 %	100 %

			Persentase layanan sesuai SOP	100 %	100 %
			Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	93 %	97 %
			Persentase usulan masyarakat yang di setuju	15 %	20 %
			Persentase urusan pemerintahan umum yang koordinasikan	100 %	100 %

### 3.3. Program dan Kegiatan

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain :

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
  - Adanya kenaikan atau penurunan harga
  - Perbedaan harga antara yang tertuang dalam DPA SKPD dengan harga real di pasaran
  
- b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Rekapitulasi Program dan Kegiatan yang terselenggara dan terjabar pada DPA-SKPD Kecamatan Praya Timur adalah :

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA:**

- *Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- *Administrasi keuangan perangkat daerah*
- *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
- *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN  
PUBLIK**

- *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

- *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*

**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

- *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- *Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*

**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

- *Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*

BAB IV

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Lombok Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR KEWILAYAHAN		Kantor Camat Praya Timur		4.655.045.720				5.109.924.712
	KECAMATAN				4.655.045.720				5.109.924.712
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		B predikat	373.260.058			B predikat	410.586.064
	<i>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase IKU OPD yang disetujui</i>		100 %	373.260.058	DAU		100 %	410.586.064
	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan (Renstra Renja)		2 dok.	3.121.006	DAU		2 dok.	3.433.107
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SK	Dokumen RKA SKPD		1 Dok.	1.757.908			1 Dok.	1.933.698
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKPA SKPD		1 Dok.	1.081.704			1 Dok.	1.189.874
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD		1 Dok.	1.081.704			1 Dok.	1.189.874
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPPA SKPD		1 Dok.	1.081.7044			1 Dok.	1.189.874



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD		12 Lap.	5.491.158			12 Lap.	6.040.273
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil evaluasi kinerja kinerja PD ( LKJIP,LPPD,LKPD)		3 Dok.	5.491.158			3 Dok.	6.040.273
	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD</b>		<b>3 dok.</b>	<b>2.563.590.232</b>			<b>3 dok.</b>	<b>2.563.590.232</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		20 dok.	2.552.666.162	DAU		20 dok.	2.807.932.778
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan SKPD		18 dok.	6.080.189			18 Lap.	5.328.270
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Tahunan SKPD		12 Lap.	4.843.882			1 Lap.	6.688.208
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP</b>		100 %	<b>230.134.512</b>			100 %	<b>253.147.963</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan		5 Jenis	12.623.832			5 jenis	13.886.215
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer dan perlengkapannya		1 Unit	146.830.592			1 unit	161.513.651
		Printer		6 Unit				6 unit	
		Laptop		2 Unit				2 unit	
		alat kebersihan		5 Jenis				5 jenis	
		peralatan dan perlengkapan lainnya		2 Jenis				2 jenis	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga		5 Jenis	34.386.380			5 jenis	37.825.018
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 lap.	36.293.708			4 lap.	39.923.079
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase validasi data aset OPD</b>		<b>4 jenis / 73 jenis</b>	<b>23.186.156</b>			<b>4 jenis / 73 jenis</b>	<b>25.504.771</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas		1 unit				1 unit	
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas		1 unit				1 unit	

	operasional							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan mesin lainnya	1 jenis				1 jenis	
	Pengadaan Mebel	Mebel	3 jenis	21.078.323			3 jenis	25.504.771
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>24.663.430</b>			<b>100 %</b>	<b>29.842.750</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12 bulan	1.800.000			12 bulan	1.800.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lap.Internet	120 mbps	8.349.000			120 mbps	10.102.290
		Lap. air	6000 m3	5.988.290			6000 m3	7.245.831
		Lap. Listrik	6.456 kwh	8.148.140			6.456 kwh	9.859.249
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD kondisi baik</b>	<b>59 jenis / 398 buah</b>	<b>118.479.570</b>			<b>59 jenis / 398 buah</b>	<b>143.360.280</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas terpelihara	14 Unit	<b>118.479.570</b>			14 unit	143.360.280
		STNK kendaraan dinas yang di perbaharui	14 Unit				14 unit	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12 Bulan				12 bulan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 paket				1 paket	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan</b>	<b>100 %</b>	<b>192.360.894</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>233.243.355</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>192.360.894</b>			<b>100 %</b>	<b>233.243.355</b>

	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait		4 lap.	192.360.894			4 lap.	212.039.414
		Profil kecamatan		1 lap.				1 lap.	
		Laporan hasil koordinasi pemerintahan umum		1 lap.				1 Lap	
		Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB		1 Lap.				1 lap.	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Dokumen Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		2 Dok				2 Dok.	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan		2 Lap.				2 lap.	
		Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK		1 lap.				1 lap.	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Porsentase usulan masyarakat yang disetujui</b>		<b>20%</b>	<b>71.082.354</b>			<b>25 %</b>	<b>86.189.486</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Porsentase usulan sesuai prioritas daerah</b>		<b>45 %</b>	<b>71.082.354</b>			<b>50 %</b>	<b>86.189.486</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan hasil musrenbang kecamatan		1 lap.	71.082.354			1 lap.	<b>86.189.486</b>
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu</b>		<b>95 %</b>	<b>90.084.113</b>			<b>100 %</b>	<b>109.229.690</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>120 dok.</b>	<b>90.084.113</b>			<b>120 dok.</b>	<b>109.229.690</b>
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang telah di evaluasi R-APBDes		14 desa	90.084.113			18 Desa	<b>109.229.690</b>
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase pengendalian gangguan ketertiban Masyarakat</b>		<b>100 %</b>	<b>48.090.224</b>			<b>100 %</b>	<b>58.310.839</b>

	<b>Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertraman dan ketertiban umum</b>	<b>Presntase gangguan tratribum yang ditangani</b>		<b>70 %</b>	<b>48.090.224</b>			<b>75 %</b>	<b>58.310.839</b>
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Laporan Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		12 lap.	48.090.224			12 lap.	<b>58.310.839</b>
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>persentase urusan pemerintahan umum yang di koordinasikan</b>		<b>100 %</b>	<b>338.619.303</b>			<b>100 %</b>	<b>410.586.064</b>
	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>Persentase konflik sosial yang diselesaikan</b>		<b>90 %</b>	<b>338.619.303</b>			<b>95 %</b>	<b>410.586.064</b>
	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Laporan pelaksanaan kegiatan kerukunan keagamaan dan hari beasar Nasional		1 keg.	338.619.303			1 keg.	<b>410.586.064</b>
		Tabliq akbar ramadhan		1 keg.				1 keg.	
		Laporan pelaksanaan MTQ/STQ tingkat kecamatan		1 lap..				1 lap..	
		Perayaan HUT RI		1 lap..				1 lap..	
		Carnaval Vestifal Bau Nyale		1 lap.				1 lap.	

CAMAT PRAYA TIMUR,

**H.LALU FATHURRAHMAN,SH.**

NIP.196712311986021020

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Dari uraian diatas dapat kami simpulkan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik ( Good Government ) perlu didukung dengan kemampuan dana / anggaran yang memadai, Sumber Daya Manusia, Peralatan serta sumber pendukung lainnya yang memadai .

Disamping itu penetapan prioritas pembangunan yang meliputi berbagai aspek sangat urgen untuk dilakukan. Prioritas itu meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat seperti : jalan, jembatan, perbaikan pasar,terminal dan lain-lain.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di semua bidang pokok yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk mensukseskan setiap program pemerintah, yang diikuti dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang.
4. Terus mengupayakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang telah ada dan mendorong masyarakat untuk membiasakan diri dengan budaya hidup sehat.
5. Menjaga dan mempertahankan kondisi keamanan yang semakin kondusif, dengan meningkatkan kerjasama antara aparat keamanan dengan masyarakat.

## **2. SARAN-SARAN**

1. Pemerintah atasan hendaknya terus melakukan analisa dan kajian-kajian di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, stabilitas daerah dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah.
2. Meningkatkan anggaran SKPD Kecamatan sebagai unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan.

Mujur, Januari 2024

CAMAT PRAYA TIMUR,

**H.LALU FATHURRAHMAN,SH.**

NIP. : 196712311986021020